



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2025**

**JL. TULIP NO. 2 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21164 FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Laporan Pengukuran Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Bara dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada umumnya, dan semoga di tahun yang akan datang capaian kinerjanya dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuandan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen laporan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Henry Faisal
HENRY FAISAL, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah melalui pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan persatuan, serta pengelolaan dinamika politik dan organisasi kemasyarakatan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan demokratis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme pengukuran kinerja yang objektif dan terukur guna mengevaluasi capaian program serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Melalui laporan pengukuran kinerja ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program, sehingga langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Selain itu, hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya evaluasi kinerja yang berkelanjutan, Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat dan kondusif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang perbaikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat serta terstruktur mengenai kinerja Badan Kesbangpol, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna dalam perencanaan dan pengelolaan program kerja ke depan.

2. Tujuan

Penyusunan laporan pengukuran kinerja ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja.
- c. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- e. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

C. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Dengan adanya pengukuran kinerja yang terstruktur dan berbasis data, berbagai manfaat dapat diperoleh, baik bagi instansi pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Beberapa manfaat utama dari pengukuran kinerja ini antara lain :

- a. Sebagai Alat Evaluasi dan Perbaikan Kinerja
- b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.
- c. Mempermudah Pengambilan Keputusan dan Penyusunan Kebijakan
- d. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Program
- e. Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- f. Memotivasi Aparatur dalam Peningkatan Kinerja
- g. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Dengan demikian, pengukuran kinerja bukan hanya sebagai alat evaluasi semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat peran Badan Kesbangpol dalam menjaga ketahanan bangsa dan stabilitas daerah di Kabupaten Lampung Barat.

D. Sasaran Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk menilai pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung stabilitas politik, ketahanan nasional, serta peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Sasaran dari pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran perangkat daerah disemua jenjang pelaksanaan.
- b. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

BAB II

PENGUKURAN KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pengukuran kinerja output dan outcome dilaksanakan berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Tingkatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan pada tingkat :

1. Unit Eselon II

Ukuran keberhasilan kinerja unit eselon II dalam menjalankan program diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome* yang merupakan hasil dari berfungsinya *output* yang dihasilkan oleh unit satuan kerja. Pengukuran kinerja unit eselon II dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2. Unit Eselon III

Ukuran keberhasilan unit eselon III dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada level *output* dan *output* penting (hasil/*outcome*). Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran

dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3. Unit Eselon IV/Fungsional

Ukuran keberhasilan unit eselon IV/Fungsional dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada subkegiatan yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

4. Unit Pelaksana

Unit Pelaksana adalah unit terkecil yang berada dalam suatu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam membantu keberhasilan ketercapaian kinerja eselon IV/fungsional. Ukuran keberhasilan unit pelaksana dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada indikator-indikator subkegiatan yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

C. Langkah-Langkah Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Membandingkan realisasi dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja yang direncanakan dalam rencana strategis;

D. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Sebelum melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja, maka diperlukan pengumpulan data capaian kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit bawah lalu dikumpulkan pada unit di atasnya. Untuk

mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU serta indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut :

- a. Pengukuran IKU dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada *e_sakip* dan *sakti berkibar*.
- c. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai koordinator dan bertanggung jawab ditingkat perangkat daerah.

2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/subkegiatannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melalui Sekretaris Badan yang dilakukan secara periodik setiap bulan atau triwulan.
- b. Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Laporan SiAP Online) dan Bappeda (Monev Triwulan).

E. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian kinerja perangkat daerah maka perlu ditentukan target sebagai ukuran keberhasilan sebuah pekerjaan selanjutnya target dan capaian kinerja juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah terkait hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan dan

sasaran perangkat daerah yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama perangkat daerah.

Penetapan tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat		Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	84,15 (Sangat Tinggi)
		Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%
			Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,54%

BAB III

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan Strategis

Untuk capaian Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja tahun 2025.

Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut juga merupakan salah satu indikator dari sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023- 2026 Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian pencapaian kinerja ini sekaligus mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Adapun realisasi indikator kinerja tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama terealisasi sebesar 90.50 point (Sangat Tinggi) dan realisasi tersebut melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 84.15 point (sangat tinggi) atau dengan capaian 107.55%.

Pencapaian kinerja pada indikator tujuan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 84,06 poin dengan kategori Sangat Tinggi dan pada tahun 2023 tercapai 89.58 poin kategori Sangat Tinggi dan tahun 2025 tercapai 90.50 poin katagori Sangat Tinggi sekaligus melampaui dari target yang ditetapkan tahun 2025 yakni 84,15 poin. Penghitungan capaian tersebut berdasarkan hasil survey indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh tim survey dari Universitas Lampung.

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	2025	
					TARGET	REALISASI
1	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	84,06 (Sangat Tinggi)	84,06 (Sangat Tinggi)	89,58 (Sangat Tinggi)	84,5 (Sangat Tinggi)	90,50 (Sangat Tinggi)

Capaian nilai indeks KUB Kabupaten Lampung Barat ini juga telah melampaui nilai indeks KUB yang di capai oleh Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 73.3 poin dan juga melampaui nilai indeks KUB nasional tahun 2025 sebesar 76.47 poin.

Nilai Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat tersebut memang sangat sesuai dengan kondisi realitas yang ada dimasyarakat, dimana kehidupan masyarakat Lampung Barat kondusif, aman, damai dan kehidupan toleransi antar masyarakat masih terjaga dengan baik. Terciptanya kondisi tersebut merupakan hasil peran penting dari berbagai unsur dan elemen yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain dari peran pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, FKUB Kabupaten Lampung Barat, para tokoh agama serta masyarakat. Kondisi ini hendaknya terus dipelihara dan jaga terus menerus oleh semua komponen yang ada di Kabupaten Lampung Barat mengingat tantangan dan permasalahan dimasa yang akan datang sangat kompleks.

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran Menurunnya Konflik SARA dengan indikator kinerja Persentase Pengurangan Konflik SARA target 100%.

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat, upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari deteksi dini adanya potensi konflik hingga upaya penyelesaian agar potensi tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa konflik.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik SARA pada tahun 2025 antara lain :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari uraian pelaksanaan program-program yang diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Analisis dalam mencapai target kinerja pada indikator sasaran tersebut yaitu :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%

Perolehan angka realisasi tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA}}{\text{Jumlah Potensi Konflik SARA}} \times 100 \%$

$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$

Perolehan angka potensi konflik dan penyelesaian potensi konflik agar tidak menjadi sebuah peristiwa konflik adalah dari adanya dua permasalahan yang berpotensi menjadi peristiwa konflik dilingkungan masyarakat yaitu:

- a) Potensi konflik yang dipicu oleh adanya gangguan hewan liar dimana terdapat masyarakat yang dimangsa oleh harimau dan lingkungan pemukiman penduduk yang dirusak oleh kawanan gajah diwilayah Kecamatan Suoah dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Dari peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dengan petugas pos jaga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang berada di Kecamatan Suoh.
- b) Potensi konflik dipicu oleh adanya keberatan masyarakat dengan rencana pembangunan gereja di Pekok Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit, alasan penolakan masyarakat dilingkungan rencana pembangunan gereja tersebut dikarenakan pada lingkungan tersebut sudah berdiri 3 buah gereja, dan selanjutnya untuk penanganan masalah tersebut akan dilakukan secara internal dikalangan umat Kristen.

Dengan adanya dua peristiwa yang potensial dapat menimbulkan konflik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan pihak Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, MUI Lampung Barat dan pengurus FKUB Lampung Barat melakukan proses penyelesaian dan solusi terbaik untuk para pihak terkait, dengan adanya

penanganan yang cepat dan tepat tersebut maka potensi konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan baik sehingga sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Lampung Barat tidak terjadi konflik SARA.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan realitas dilingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat tentunya sangat relevan mengingat sepanjang tahun 2025 wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat aman dan kondusif dari ancaman konflik SARA serta kehidupan masyarakat yang rukun hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian indeks kerukunan umat beragama yang di laksanakan oleh Universitas Lampung, dimana dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil sebesar 90.50 poin dengan kategori Sangat Tinggi, nilai indeks KUB Kabupaten Lampung Barat ini melampaui nilai indek KUB yang di capai oleh Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 73.3 poin dan juga melampaui nilai indeks KUB nasional tahun 2025 sebesar 76.47 poin.

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan.

Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 100 % terealisasi 100% yang artinya konflik di wilayah Lampung Barat dapat terselesaikan sehingga kondisi Kabupaten Lampung Barat kondusif.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 100% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 adalah 100 % dan tahun 2022 adalah 100%, sehingga terlihat bahwa kondisi yang kondusif di Kabupaten Lampung Barat selalu terjaga.

3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah.

Target kinerja dimaksud telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, realisasi kinerja pada tahun 2025 ini sudah mencapai target yang tertuang pada rencana strategis perangkat daerah, dengan prosentase tingkat capaian 100 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Pemerintah pusat tidak menetapkan secara spesifik indikator dan target kinerja pengurangan konflik SARA, oleh karena itu target kinerja ini tidak mendapat perbandingan secara nasional.

Sedangkan untuk target kinerja pada tingkat Provinsi Lampung dapat dilihat pada salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang sejalan dengan dengan indikator tersebut yaitu Prosentase Menurunnya potensi konflik Sosial Tidak Menjadi Peristiwa Konflik Sosial Setiap

Tahunnya di Provinsi Lampung dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%.

Melihat target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tersebut, maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang sejalan dengan indikator tersebut telah mencapaian target kinerja tahun 2025 sebesar 100%.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
 - a. Koordinasi yang intens antara pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Barat serta Tim Penanganan Konflik Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan Nasional
 - c. Diselenggarakannya rasa patriotisme dengan peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat serta pendidikan karakter.
 - d. Mefasilitasi dan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung Barat dalam membina kerukunan dan toleransi dilingkungan masyarakat.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk indikator Persentase Pengurangan Konflik SARA sudah efisien dikarenakan target dapat tercapai 100%, adapun Program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan anggaran Rp. 5.971.414.126,00 dan terealisasi sebesar 99,56 % atau Rp. 5.945.374.835,00.

2. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

a. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi target 86%.

Target indikator tersebut pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 86 % masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan

dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 serta pelaksanaan Pemililihan Kepala Daerah serentak tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2025.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Dari pelaksanaan program yang diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Analisis dalam mencapai target kinerja pada indikator sasaran tersebut yaitu :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%	79,5%

Perolehan angka realisasi tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagai berikut :

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Lampung Barat
pada Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2025**

NO	URAIAN	JUMLAH DPT	SURAT SUARA TERPAKAI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ➤ Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 21.719 suara. ➤ Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 115.550 suara. ➤ Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 38.850 suara.	223.066	187.525	84.07 %
2	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	223.066	187.363	83.99 %
3	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	223.066	187.276	83.96 %
4	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung	223.066	187.185	83.91 %
5	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat	223.066	187.122	83.89 %
6	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	222.236	151.810	68.31 %
7	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	222.236	151.875	68.34 %
JUMLAH		1.559.802	1.239.831	79.5%

$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi (Pemilu + Pilkada 2025)}}{\text{Jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih (Pemilu + Pilkada 2025)}} \times 100 \%$

$\frac{1,239,831}{1,559,802} \times 100 \% = 79,5 \%$

Perolehan angka 1.239.831 didapat dari penjumlahan surat suarat yang terpakai sedangkan angka 1.559.802 merupakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2025 dengan demikian rata-rata realisasi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2025 sebesar 79,5%.

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini :

Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 86 % terealisasi 79,5 %, yang artinya target Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi tahun 2025 tidak sesuai target sebesar 86% hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yakni hak individu masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 sebesar 85% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2025 adalah 79,5 % untuk itu pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang agar kiranya lebih maksimal lagi dalam melakanakan kerja-kerja program kegiatan.

3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah.

Target kinerja dimaksud telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, realisasi kinerja pada tahun 2025 tidak mencapai target yang tertuang pada rencana strategis perangkat daerah, degan prosentase tingkat capaian 86%.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Perintah Republik Indonesia didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 telah menetapkan target tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 79.5% dengan demikian

angka partisipasi pemilih Kabupaten Lampung Barat telah mencapai target nasional.

5. Analisis dan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja :

- a. Penggunaan hak pilih dalam pelaksanaan pemungutan suara merupakan sepenuhnya hak asasi masyarakat oleh karena itu tidak ada paksaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya tersebut, dalam Negara demokrasi hak untuk memilih dan dipilih telah dilindungi oleh undang-undang.
- b. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi terkait pemilihan umum oleh instansi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan didukung oleh Bawaslu, pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta masyarakat penggiat demokrasi perlu ditingkatkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi cukup efisien meskipun tidak dapat mencapai target kinerja perangkat daerah tetapi mampu mencapai target nasional sebesar 79.5%, adapun Program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran Rp. 23.085.835.716,00 dan terealisasi sebesar 99,98% atau Rp. 23.083.286.903,00.

b. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

Target indikator tersebut pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 5.54 % yang artinya terdapat 5.54% organisasi masyarakat maupun LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat telah menjalin kemitraan dan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun jumlah ormas/LSM yang terdata berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 429 ormas/LSM.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dari pelaksanaan program yang diterjemahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Analisis dalam mencapai target kinerja pada indikator sasaran tersebut yaitu :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5.54%	6.99%

Perolehan angka realisasi tersebut diperoleh dari formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ormas yang bermitra dengan pemerintah}}{\text{Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100 \%$$

$$\frac{30}{429} \times 100 \% = 6,99 \%$$

Perolehan angka 30 didapat dari jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan dan mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate Lampung Barat sedangkan angka 429 merupakan jumlah dari Ormas/LSM yang terdaftar keberadaannya di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini :

Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 5.54 % terealisasi 6.99 %, yang artinya target Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah telah melampaui target yang ditetapkan, persentase capaian realisasi sebesar 126%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 6.99% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 adalah 6.42 % dan tahun 2022 adalah 5.73%, sehingga terlihat bahwa organisasi masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terus meningkat pada setiap tahunnya hal ini tentunya sangat mendukung kehidupan demokrasi dalam wujud kebebasan berkumpul dan berserikat bagi warga masyarakat.

3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah.

Target kinerja dimaksud telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, realisasi kinerja pada tahun 2025 ini sudah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada rencana strategis perangkat daerah sebesar 5,54% dan telah tercapai sebesar 6,99% atau dengan prosentase tingkat capaian 126 %.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Secara nasional indikator ini tidak menjadi target kinerja utama, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak menetapkan indikator yang sejalan dengan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

a. Terjaganya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan Organisasi Masyarakat/LSM yang keberadaannya terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui forum silaturahmi Ormas/LSM dengan pemerintah daerah serta adanya pemberian bantuan dana untuk mendukung kegiatan operasional ormas/LSM tersebut.

b. Terasilinasinya Kegiatan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk indikator Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah sudah efisien dikarenakan target yang direncanakan sebesar 5.54% tercapai sebesar 6.99%, adapun program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 502.042.000,00 dan terealisasi sebesar 95,49 % atau Rp. 479.433.203,00.

**EVALUASI KINERJA TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA TUJUAN				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA SASARAN			
			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4	TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4	TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	-	-	-	84.15 (Sangat Tinggi)	-	-	-	90.50 (Sangat Tinggi)	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
											Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	86%	86%	86%	86%	83%	83%	83%	79.5%
												Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	-	5.54 %	5.54 %	5.54 %	-	3.98%	5.19%	6.99%

C. Capaian Kinerja Program

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 6 (enam) Program, dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp. 31.793.075.831,00 (*Tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*) dengan realisasi anggaran pada berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.550.347.134,00 (*Tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua empat rupiah*) atau sebesar 99,22% dengan rincian pagu dan realisasi program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor antara lain pembayaran gaji dan tunjangan ASN, Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat, pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralatan dan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.233.783.989,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 terserap sebesar Rp. 1,785,286,418,- atau sebesar 97.90%. adapun indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 76.05 poin dan terealisasi sebesar 78.20 poin atau predikat BB.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Indikator pada program ini adalah Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan dengan target sebesar 85% dan telah terealisasi sebesar 85%. Untuk mencapai target pada program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,011,884,840,- dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.006.997.543,- atau sebesar 99.51%.

Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi Pembinaan Paskibraka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
2. Seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat.
3. Diklat pembentukan calon anggota Paskibraka Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebanyak 50 orang siswa tingkat SLTA yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat.
4. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan peserta sebanyak 100 orang.
5. Sosialisasi pemahaman radikalisme, terorisme dan intoleransi.sebanyak 100 orang.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Indikator pada program ini adalah Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat dengan target sebesar 70% dan telah terealisasi sebesar 70%. Untuk mencapai target pada program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.085.835.716,- dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 23.083.286.900,- atau sebesar 99.98%.

Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Upgrade aplikasi untuk pemantauan hasil penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2025 dengan nama aplikasi SiTepat.
2. Pelatihan untuk petugas input aplikasi SiTepat sebanyak 213 orang.
3. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim DESK Pemilu dan Pilkada 2025 Kabupaten Lampung Barat
4. Sosialisasi per-Undang-Undangan bidang politik.
5. Penyelenggaraan forum diskusi politik bagi anggota partai politik beserta pihak-pihak terkait.
6. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Lampung Barat.
7. Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator pada program ini adalah Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif dengan target sebesar 60% dan telah terealisasi sebesar 60%. Untuk mencapai target pada program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 502.042.000,- dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 479.433.203,- atau sebesar 95.49%.

Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Penyusunan data keberadaan partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
2. Penyelenggaraan kegiatan forum silaturahmi dan sosialisasi kepada anggota Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
3. Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Indikator pada program ini adalah Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat dengan target sebesar 72% dan telah terealisasi sebesar 72%. Untuk mencapai target pada program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 391,255,900,- dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 388.646.250,- atau sebesar 99.33%.

Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Mengikuti ajang pameran produk unggulan Kabupaten Lampung Barat di TMII dalam rangka mendukung revitalisasi anjungan TMII di Jakarta.
2. Pembinaan Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau yang telah ditetapkan sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba).
3. Sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para pelajar.
4. Bantuan hibah uang dan fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi anggota FKUB Kabupaten Lampung Barat.
5. Kegiatan survey penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Indikator pada program ini adalah Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100%. Untuk mencapai target pada program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.568.273.386,- dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 4.549.731.042,- atau sebesar 99.59%.

Anggaran pada program dan kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemantauan kondisi wilayah dalam rangka kesapadaan dini.
3. Penyelenggaraan kordinasi antara pimpinan daerah dengan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
4. Bantuan hibah uang dan barang kepada instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Hibah uang kepada Polres Lampung Barat dan Kodim 0422/LB untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2025.

**EVALUASI KINERJA TINGKAT PROGRAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	6	7	7
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1 = 76,05 Poin	Trw 1 = 78,20 Poin	Trw 1 = Rp 1,085,202,581	Trw 1 = Rp 405,871,398
					Trw 2 = 76,05 Poin	Trw 2 = 78,20 Poin	Trw 2 = Rp 1,152,386,681	Trw 2 = Rp 1,106,931,294
					Trw 3 = 76,05 Poin	Trw 3 = 78,20 Poin	Trw 3 = Rp 1,961,832,100	Trw 3 = Rp 1,564,712,596
					Trw 4 = 76,05 Poin	Trw 4 = 78,20 Poin	Trw 4 = Rp 2,233,783,989	Trw 4 = Rp 2,042,252,193
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Trw 1 = 60%	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 206,792,200	Trw 1 = Rp 158,392,732
					Trw 2 = 70%	Trw 2 = 70%	Trw 2 = Rp 585,096,200	Trw 2 = Rp 260,917,282
					Trw 3 = 80%	Trw 3 = 80%	Trw 3 = Rp 1,001,194,840	Trw 3 = Rp 984,676,868
					Trw 4 = 85%	Trw 4 = 85%	Trw 4 = Rp 1,011,884,840	Trw 4 = Rp 1,006,997,543
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Etika dan Budaya Politik Partai Politik masyarakat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 928,786,272	Trw 1 = Rp 235,970,000
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = 65%	Trw 2 = Rp22,820,206,829	Trw 2 = Rp 703,455,492
					Trw 3 = 69%	Trw 3 = 69%	Trw 3 = Rp22,959,830,329	Trw 3 = Rp22,638,240,949
					Trw 4 = 70%	Trw 4 = 70%	Trw 4 = Rp23,085,835,716	Trw 4 = Rp23,083,286,903

1	2	3	4	5	6	6	7	7
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	Trw 1 = 55%	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 272,400,000	Trw 1 = Rp 12,400,000
					Trw 2 = 55%	Trw 2 = 40%	Trw 2 = Rp 355,787,000	Trw 2 = Rp 236,725,000
					Trw 3 = 55%	Trw 3 = 51%	Trw 3 = Rp 448,097,000	Trw 3 = Rp 335,971,500
					Trw 4 = 60%	Trw 4 = 60%	Trw 4 = Rp 502,042,000	Trw 4 = Rp 479,433,203
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = 30%	Trw 1 = Rp 113,013,000	Trw 1 = Rp 109,845,500
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = 40%	Trw 2 = Rp 246,874,300	Trw 2 = Rp 118,108,000
					Trw 3 = 71%	Trw 3 = 57%	Trw 3 = Rp 297,465,500	Trw 3 = Rp 146,750,250
					Trw 4 = 72%	Trw 4 = 72%	Trw 4 = Rp 391,255,900	Trw 4 = Rp 388,646,250
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan aparaturnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	Trw 1 = 100%	Trw 1 = 100%	Trw 1 = Rp 40,261,000	Trw 1 = Rp 28,426,200
					Trw 2 = 100%	Trw 2 = 100%	Trw 2 = Rp 3,851,956,750	Trw 2 = Rp 3,226,213,009
					Trw 3 = 100%	Trw 3 = 100%	Trw 3 = Rp 3,886,716,250	Trw 3 = Rp 3,868,097,570
					Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp 4,568,273,386	Trw 4 = Rp 4,549,731,042

D. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 sebanyak melaksanakan 6 (enam) Program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan rincian pagu dan realisasi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Pagu dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

1	2	TARGET DAN REALISASI KINERJA		TARGET DAN REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76,05 Poin	78,20 Poin	2,233,783,989	2.042.252.193	91.43
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,855,800	21.472.800	86.39
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	10 Dokumen	3,884,000	3.824.000	98.46
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,057,000	3.037.000	99.35
8.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,577,000	1.954.500	75.84
8.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,078,000	2.410.000	78.30
8.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,068,000	2.400.000	78.23
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3,527,000	2.455.000	69.61
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9 Laporan	5,664,800	5.392.300	95.19
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,874,031,689	1.695.681.023	90.48
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	18 Orang	1,865,432,689	1.687.899.523	90.48
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,542,000	2.422.000	95.28
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,563,000	2.885.500	80.99
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2,494,000	2,474,000	99,20
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			11,234,000	10.791.800	96.06
8.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11,234,000	10.791.800	96.06

1	2	3	4	5	6	7
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,872,000	12.837.150	99.73
8.01.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	12,872,000	12.837.150	99.73
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			116,389,600	113.737.525	97.72
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	2,163,600	2,162,800	99,96
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	12,210,000	11.890.000	97.38
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 dokumen	6 dokumen	5,760,000	5,760,000	100
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	9 Laporan	3,596,000	3,596,000	100
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9 Laporan	92,660,000	90.328.725	97.48
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55,500,000	55,150,000	99,37
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8 unit	8 unit	39,500,000	39,150,000	99,11
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	16,000,000	16,000,000	100,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,754,900	73.780.335	96.12
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,800,000	1.800.000	100
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	48 laporan	36 laporan	16,785,000	14.743.435	87.84
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	73,65	58,169,900	57.236.900	98.40
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			62,146,000	58.801.560	94.62
8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	45,300,000	41.955.560	92.62
8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	8 unit	6,846,500	6,846,500	100
8.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	9,999,500	9,999,500	100,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	80%	80%	1,011,884,840	1.006.997.543	99.52
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1,011,884,840	1.006.997.543	99.52
8.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	62,257,000	61.148.800	99.52
8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	56,417,000	55.522.475	98.41

1	2	3	4	5	6	7
8.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas ke-paskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	193,897,000	192.567.044	99.31
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	50 Orang	50 Orang	699,313,840	697.759.224	99.79
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	69%	69%	23,085,835,716	23.083.286.903	99.99
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Situasi			23,085,835,716	23.083.286.903	99.99
8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	213 Orang	213 Orang	400,000,000	398.723.377	99.68
8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	102,547,500	101,632,050	99,11
8.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi di Daerah	10 Laporan	9 Laporan	22,583,288,216	22,582,931,476	99.99
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	55%	51%	502,042,000	479.433.203	95.50
8.01.04.2.01	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			502,042,000	479.433.203	95.50
8.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	29,055,000	28.918.353	99.53
8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	60 Orang	472,987,000	450.514.850	95.25

1	2	3	4	5	6	7
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	71%	57%	391,255,900	388.646.250	99.33
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya			391,255,900	388.646.250	99.33
8.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang	40 Orang	175,842,500	175.028.450	99.54
8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang	40 Orang	133,103,000	133,029.700	99.94
8.01.05.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	82,310,400	80.588.100	97.91
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	4,568,273,386	4.549.731.042	99.59
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			4,568,273,386	4.549.731.042	99.59
8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	25 Orang	22,000,000	20.927.100	95.12
8.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Laporan	11 Laporan	131,793,500	125.775.865	95.43
8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	4,414,479,886	4.403.028.077	99.74
JUMLAH				31,793,075,831	31.550.347.134	99.24

**EVALUASI KINERJA TINGKAT SUB KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	
							TARGET	REALISASI	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 8 Dokumen	Trw 1 = 8 Dokumen	Trw 1 = 2,205,500	Trw 1 = 1,261,500
							Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = 2,205,500	Trw 2 = 2,195,500
							Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = 3,884,000	Trw 3 = 3,216,500
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 3,884,000	Trw 4 = 3,824,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1,729,500	Trw 2 = 1,822,000
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 3,057,000	Trw 3 = 3,037,000
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 3,057,000	Trw 4 = 3,037,000
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = -	Trw 2 = -
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 2,577,000	Trw 3 = 2,562,000
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 2,577,000	Trw 4 = 1,954,500
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = -	Trw 2 = -
							Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = -	Trw 3 = -
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 3,078,000	Trw 4 = 2,410,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 3,068,000 Trw 4 = 3,068,000	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 1,428,000 Trw 4 = 2,400,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Trw 1 = Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = Trw 2 = 1 Laporan Trw 3 = 1 Laporan Trw 4 = 2 Laporan	Trw 1 = - Trw 2 = 1,838,000 Trw 3 = 1,838,000 Trw 4 = 3,527,000	Trw 1 = - Trw 2 = 776,000 Trw 3 = 776,000 Trw 4 = 2,455,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 1,580,000 Trw 2 = 2,845,000 Trw 3 = 4,110,000 Trw 4 = 5,664,800	Trw 1 = 200,000 Trw 2 = 2,020,000 Trw 3 = 3,260,000 Trw 4 = 5,392,300
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 = 14 Orang Trw 2 = 15 Orang Trw 3 = 15 Orang Trw 4 = 15 Orang	Trw 1 = 15 Orang Trw 2 = 16 Orang Trw 3 = 18 Orang Trw 4 = 18 Orang	Trw 1 = 931,546,781 Trw 2 = 931,546,781 Trw 3 = 1,641,969,700 Trw 4 = 1,865,432,689	Trw 1 = 321,552,804 Trw 2 = 906,433,086 Trw 3 = 1,286,875,349 Trw 4 = 1,687,899,523
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2,542,000	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2,422,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1,876,500	Trw 2 = 1,259,000
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1,876,500	Trw 3 = 1,259,000
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 3,563,000	Trw 4 = 2,885,500
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 =	Trw 2 = -	Trw 2 = -	Trw 2 = -
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 2,494,000	Trw 3 = 2,474,000
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 2,494,000	Trw 4 = 2,474,000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 5,423,000	Trw 1 = 360,000	
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 10,441,000	Trw 2 = 5,533,800	
						Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = 10,441,000	Trw 3 = 5,533,800	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 11,234,000	Trw 4 = 10,791,800	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 6,432,000	Trw 1 = 1,690,000
							Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 6,432,000	Trw 2 = 4,640,000
							Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = 12,872,000	Trw 3 = 9,279,150
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 12,872,000	Trw 4 = 12,837,150
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Trw 1 = 1 paket	Trw 1 = 1 paket	Trw 1 = 1,086,800	Trw 1 = 1,166,800	
						Trw 2 = 1 paket	Trw 2 = 1 paket	Trw 2 = 1,086,800	Trw 2 = 1,166,800	
						Trw 3 = 1 paket	Trw 3 = 1 paket	Trw 3 = 2,163,600	Trw 3 = 2,162,800	
						Trw 4 = 1 paket	Trw 4 = 1 paket	Trw 4 = 2,163,600	Trw 4 = 2,162,800	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Trw 1 = 2 paket	Trw 1 = 2 paket	Trw 1 = 3,100,000	Trw 1 = 3,000,000	
						Trw 2 = 2 paket	Trw 2 = 2 paket	Trw 2 = 5,975,000	Trw 2 = 5,775,000	
						Trw 3 = 2 paket	Trw 3 = 2 paket	Trw 3 = 9,010,000	Trw 3 = 8,790,000	
						Trw 4 = 2 paket	Trw 4 = 2 paket	Trw 4 = 12,210,000	Trw 4 = 11,890,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	Trw 1 = 6 dokumen	Trw 1 = 6 dokumen	Trw 1 = 1,440,000	Trw 1 = 960,000
				Trw 2 = 6 dokumen	Trw 2 = 6 dokumen	Trw 2 = 2,880,000	Trw 2 = 2,880,000			
				Trw 3 = 6 dokumen	Trw 3 = 6 dokumen	Trw 3 = 4,320,000	Trw 3 = 4,320,000			
				Trw 4 = 6 dokumen	Trw 4 = 6 dokumen	Trw 4 = 5,760,000	Trw 4 = 5,760,000			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 762,000	Trw 1 = 762,000
				Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 1,775,000	Trw 2 = 1,775,000			
				Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 2,623,000	Trw 3 = 2,623,000			
				Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 3,596,000	Trw 4 = 3,596,000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 33,820,000	Trw 1 = 5,120,000
				Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 46,570,000	Trw 2 = 40,479,034			
				Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 92,660,000	Trw 3 = 67,329,969			
				Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 92,660,000	Trw 4 = 90,328,725			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Terlaksananya kegiatan surat-menyerurat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Trw 1 = 8 unit	Trw 1 = 8 unit	Trw 1 = 39,500,000	Trw 1 = 39,150,000
							Trw 2 = 8 unit	Trw 2 = 8 unit	Trw 2 = 39,500,000	Trw 2 = 39,150,000
							Trw 3 = 8 unit	Trw 3 = 8 unit	Trw 3 = 39,500,000	Trw 3 = 39,150,000
							Trw 4 = 8 unit	Trw 4 = 8 unit	Trw 4 = 39,500,000	Trw 4 = 39,150,000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Trw 1 = 1 unit	Trw 1 = -	Trw 1 = 16,000,000	Trw 1 = -
							Trw 2 = 1 unit	Trw 2 = 1 unit	Trw 2 = 16,000,000	Trw 2 = 16,000,000
							Trw 3 = 1 unit	Trw 3 = 1 unit	Trw 3 = 16,000,000	Trw 3 = 16,000,000
							Trw 4 = 1 unit	Trw 4 = 1 unit	Trw 4 = 16,000,000	Trw 4 = 16,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyerurat	Terlaksananya kegiatan surat-menyerurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyerurat	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 450,000	Trw 1 = 342,000			
				Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 900,000	Trw 2 = 864,000			
				Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = 1,350,000	Trw 3 = 1,308,000			
				Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 1,800,000	Trw 4 = 1,800,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 12 Laporan Trw 2 = 24 laporan Trw 3 = 36 laporan Trw 4 = 48 laporan	Trw 1 = 12 Laporan Trw 2 = 24 laporan Trw 3 = 36 laporan Trw 4 = 48 laporan	Trw 1 = 3,985,000 Trw 2 = 7,920,000 Trw 3 = 11,905,000 Trw 4 = 16,785,000	Trw 1 = 3,559,794 Trw 2 = 7,259,704 Trw 3 = 10,977,968 Trw 4 = 14,743,435
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = 15,266,500 Trw 2 = 29,690,600 Trw 3 = 43,787,800 Trw 4 = 58,169,900	Trw 1 = 7,141,500 Trw 2 = 27,865,600 Trw 3 = 42,842,800 Trw 4 = 57,236,900
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 6 unit	Trw 1 = 6 unit	Trw 1 = 20,450,000	Trw 1 = 17,450,000
Trw 2 = 6 unit	Trw 2 = 6 unit	Trw 2 = 27,400,000					Trw 2 = 25,261,770			
Trw 3 = 6 unit	Trw 3 = 6 unit	Trw 3 = 35,100,000					Trw 3 = 34,282,060			
Trw 4 = 6 unit	Trw 4 = 6 unit	Trw 4 = 45,300,000					Trw 4 = 41,955,560			
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Trw 1 = 4 unit	Trw 1 = 4 unit	Trw 1 = 2,155,000	Trw 1 = 2,155,000			
				Trw 2 = 6 unit	Trw 2 = 6 unit	Trw 2 = 3,775,500	Trw 2 = 3,775,500			
				Trw 3 = 8 unit	Trw 3 = 8 unit	Trw 3 = 5,226,000	Trw 3 = 5,225,700			
				Trw 4 = 11 unit	Trw 4 = 11 unit	Trw 4 = 6,846,500	Trw 4 = 6,846,500			
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -			
				Trw 2 = 1 unit	Trw 2 = 1 unit	Trw 2 = 9,999,500	Trw 2 = 9,999,500			
				Trw 3 = 1 unit	Trw 3 = 1 unit	Trw 3 = 9,999,500	Trw 3 = 9,999,500			
				Trw 4 = 1 unit	Trw 4 = 1 unit	Trw 4 = 9,999,500	Trw 4 = 9,999,500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 8,500,000	Trw 1 = 11,559,000
							Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = 62,257,000	Trw 2 = 59,777,700
							Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 62,257,000	Trw 3 = 59,777,700
							Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 62,257,000	Trw 4 = 61,148,800
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -
							Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = -	Trw 2 = 56,417,000	Trw 2 = 10,050,850
							Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 56,417,000	Trw 3 = 50,303,900
							Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 100 Orang	Trw 4 = 56,417,000	Trw 4 = 55,522,475
				Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 57,863,000	Trw 1 = 15,143,000
							Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 180,437,000	Trw 2 = 19,607,000
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 193,897,000	Trw 3 = 189,331,544	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 193,897,000	Trw 4 = 192,567,044	
			Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibra	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 140,429,200	Trw 1 = 131,690,732	
						Trw 2 = 50 Orang	Trw 2 = 50 Orang	Trw 2 = 285,985,200	Trw 2 = 171,481,732	
						Trw 3 = 50 Orang	Trw 3 = 50 Orang	Trw 3 = 688,623,840	Trw 3 = 685,263,724	
						Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = 699,313,840	Trw 4 = 697,759,224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 213 Orang	Trw 1 = 213 Orang	Trw 1 = 237,282,000	Trw 1 = 229,643,000
				Trw 2 = 213 Orang	Trw 2 = 213 Orang	Trw 2 = 241,954,000	Trw 2 = 242,176,000			
				Trw 3 = 213 Orang	Trw 3 = 213 Orang	Trw 3 = 330,778,000	Trw 3 = 242,176,000			
				Trw 4 = 213 Orang	Trw 4 = 213 Orang	Trw 4 = 400,000,000	Trw 4 = 398,723,377			
				Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 11,170,000	Trw 1 = -			
				Trw 2 = 100 Orang	Trw 2 = -	Trw 2 = 57,935,500	Trw 2 = 7,107,000			
				Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 100 Orang	Trw 3 = 101,650,000	Trw 3 = 101,632,050			
				Trw 4 = 160 Orang	Trw 4 = 160 Orang	Trw 4 = 102,547,500	Trw 4 = 101,632,050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 2 Laporan	Trw 1 = -	Trw 1 = 680,334,272	Trw 1 = 6,327,000
							Trw 2 = 10 Laporan	Trw 2 = 9 Laporan	Trw 2 = 22,520,317,329	Trw 2 = 454,172,492
							Trw 3 = 10 Laporan	Trw 3 = 10 Laporan	Trw 3 = 22,527,402,329	Trw 3 = 22,294,432,899
							Trw 4 = 10 Laporan	Trw 4 = 10 Laporan	Trw 4 = 22,583,288,216	Trw 4 = 22,582,931,476
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 11,200,000	Trw 1 = 11,200,000
							Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 12,400,000	Trw 2 = 11,200,000
							Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = 21,310,000	Trw 3 = 12,898,000
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 29,055,000	Trw 4 = 28,918,353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 1 = Trw 2 = 60 Orang Trw 3 = 60 Orang Trw 4 = 60 Orang	Trw 1 = Trw 2 = 60 Orang Trw 3 = 60 Orang Trw 4 = 60 Orang	Trw 1 = 261,200,000 Trw 2 = 343,387,000 Trw 3 = 426,787,000 Trw 4 = 472,987,000	Trw 1 = 1,200,000 Trw 2 = 225,525,000 Trw 3 = 323,073,500 Trw 4 = 450,514,850
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 = Trw 2 = 40 Orang Trw 3 = 40 Orang Trw 4 = 40 Orang	Trw 1 = Trw 2 = - Trw 3 = 40 Orang Trw 4 = 40 Orang	Trw 1 = 3,460,000 Trw 2 = 129,471,300 Trw 3 = 167,962,500 Trw 4 = 175,842,500	Trw 1 = 3,150,000 Trw 2 = 5,949,000 Trw 3 = 25,938,550 Trw 4 = 175,028,450
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Trw 1 = 40 Orang Trw 2 = 40 Orang Trw 3 = 40 Orang	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0	Trw 1 = 109,553,000 Trw 2 = 117,403,000 Trw 3 = 125,253,000	Trw 1 = 106,695,500 Trw 2 = 112,159,000 Trw 3 = 116,970,350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 4 = 40 Orang	Trw 4 = 40 Orang	Trw 4 = 133,103,000	Trw 4 = 133,029,700
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = -	Trw 1 = -
			Trw 2 =				Trw 2 =	Trw 2 = -	Trw 2 = -	
			Trw 3 =				Trw 3 =	Trw 3 = 4,250,000	Trw 3 = 3,841,350	
			Trw 4 = 1 Laporan				Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = 82,310,400	Trw 4 = 80,588,100	
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 25 Orang	Trw 1 = 25 Orang	Trw 1 = 8,773,000	Trw 1 = 6,462,000
							Trw 2 = 25 Orang	Trw 2 = 25 Orang	Trw 2 = 11,268,000	Trw 2 = 8,810,000
							Trw 3 = 25 Orang	Trw 3 = 25 Orang	Trw 3 = 19,018,000	Trw 3 = 17,893,100
							Trw 4 = 25 Orang	Trw 4 = 25 Orang	Trw 4 = 22,000,000	Trw 4 = 20,927,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 23,250,000	Trw 1 = 21,214,200
			Trw 2 = 6 Laporan				Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 57,800,500	Trw 2 = 46,198,009	
			Trw 3 = 9 Laporan				Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 73,200,000	Trw 3 = 73,080,650	
			Trw 4 = 11 Laporan				Trw 4 = 11 Laporan	Trw 4 = 131,793,500	Trw 4 = 125,775,865	
			Sub Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = -	Trw 1 = 8,238,000	Trw 1 = 750,000	
						Trw 2 = 2 Laporan	Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = 3,782,888,250	Trw 2 = 3,171,205,000	
						Trw 3 = 3 Laporan	Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = 3,794,498,250	Trw 3 = 3,777,123,820	
						Trw 4 = 4 Laporan	Trw 4 = 3 Laporan	Trw 4 = 4,414,479,886	Trw 4 = 4,403,028,077	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan pengukuran kinerja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, mendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Lampung Barat. Dari uraian capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam bab-bab sebelumnya telah dipaparkan target dan capaian serta permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan bahwa perangkat daerah ini telah berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif, memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti optimalisasi sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dan politik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan inovasi terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kesimpulannya, laporan kinerja ini menjadi bukti nyata komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas. Ke depan, diharapkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder dapat terus ditingkatkan guna memperkokoh persatuan, memperkuat demokrasi, dan menjaga stabilitas daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain :

1. Dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari unsur Forkopimda Lampung Barat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kelembagaan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun pengalokasian pada komponen belanjanya belum proporsional yakni lebih besar belanja hibah dibanding dengan komponen belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

C. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Ketersediaan sarana parasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Penganggaran yang belum proporsional dimana komponen belanja hibah jauh lebih besar dibanding komponen belanja lainnya, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai.
3. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
4. Belum adanya kebijakan dalam regulasi dari perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bagi pejabat fungsional pasca dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja hibah, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
2. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
3. Perlunya regulasi yang jelas terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tiap-tiap pegawai, khususnya pada jabatan fungsional oleh perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Besar harapan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi kewenangan. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi ditahun mendatang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



[Handwritten Signature]
HENRY FAISAL, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730912 199903 1 003